

Berita	: Pencairan BPNT Rendah
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Garut
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat / Hal. 1
Edisi	: Selasa, 5 Juni 2018

Pencairan BPNT Rendah

Persentase masyarakat yang telah mencairkan bantuan pangan nontunai (BPNT) di Kabupaten Garut masih tergolong rendah, yakni 12,79%. Hal itu disebabkan minimnya jumlah agen yang terbentuk dan belum rampungnya pendistribusian kartu untuk para penerima manfaat. Kementerian Sosial meminta pencairan BPNT dipercepat dengan melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan serta mengencangkan sosialisasi.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Uu Saepudin menuturkan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pencairan BPNT berupa beras dan telur kepada masyarakat masih rendah. Dua di antaranya adalah minimnya jumlah agen penyalur bantuan dan belum rampungnya pendistribusian kartu.

Saat ini, jumlah agen penyalur bantuan yang tersedia baru 62 unit. Seharusnya, jumlah agen yang tersedia tak kurang dari 400 unit, seturut jumlah desa di Kabupaten Garut.

Minimnya jumlah agen penyalur bantuan disebabkan PT Bank Negara Indonesia, selaku pelaksana BPNT, tidak ingin sembarangan menunjuk agen. Agen harus memiliki cukup modal untuk pengadaan beras dan

telur. Bisnis yang dikerjakan agen pun harus jelas.

Terdapat beberapa agen yang mengajukan diri terlibat dalam BPNT, termasuk di antaranya badan usaha milik desa, tetapi bisnisnya tidak berjalan. Dengan demikian, badan usaha itu tidak dapat dijadikan sebagai agen penyalur BPNT.

Di sisi lain, kata Uu, masih ada kerancuan terkait dengan fungsi agen dan penyedia beras dan telur. Pekan depan, Uu akan bertemu dengan badan usaha milik desa untuk memperjelas fungsi, apakah sebagai agen atau penyalur beras dan telur.

Selain masalah agen, masih sedikitnya kartu BPNT yang terdistribusi kepada masyarakat juga menyebabkan pencairan BPNT masih ren-

dah. Dari 169.000 kartu yang seharusnya disalurkan, baru 70.000 yang didistribusikan BNI kepada masyarakat.

"Makanya, kami ultimatum, Juni 2018, kartu harus selesai didistribusikan, agen terbentuk," kata Uu kepada "PR", Senin (4/6/2018).

Kementerian Sosial pun meminta Dinas Sosial mempercepat pencairan BPNT dengan melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan serta mengencangkan sosialisasi kepada keluarga penerima manfaat. Masyarakat perlu disosialisasikan bahwa saldo yang bisa ditukarkan dengan beras dan telur sebesar Rp 110.000 sudah tersedia di tiap-tiap

rekening. Setiap tanggal 25, masyarakat bisa mencairkan saldo dalam tabungannya dengan beras dan telur.

Kementerian Sosial juga meminta Dinas Sosial tidak menunda penyaluran BPNT dengan alasan menunggu acara peresmian program tersebut. Bank penyalur BPNT, yakni BNI, juga diminta melengkapi ketersediaan e-warong atau agen penyalur beras dan telur.

Warga menunggu

Di pihak lain, banyak warga Kabupaten Garut yang mengaku menunggu pencairan BPNT. Itu pula yang kini dialami oleh warga Desa Rancabango, Kecamatan Tarogong Kaler. Eti, warga setempat, mengaku telah menerima kartu BPNT sebulan lalu. Akan tetapi, hingga kini, ia dan warga lain di desa itu belum juga menerima bantuan beras dan telur.

"Ngarep-ngarep dapat bantuan, tetapi mana? Padahal, mengambil kartu di kantor desa waktu itu mengantre sampai Magrib baru pulang,"

ujarnya.

Kartu yang sudah diambil malah dikumpulkan ke ketua RW. Hingga sekarang, belum ada informasi dari ketua RW terkait dengan waktu pencairan bantuan.

Hal serupa dinyatakan Sahrum, warga desa yang sama. Ia pun menanti-nantikan pendistribusian bantuan tersebut. Apalagi, sepengetahuannya, warga kecamatan lain, Garut Kota misalnya, sudah menerima bantuan itu.

Ia berharap, bantuan beras dan telur bisa didapat sebelum Idulfitri. "Lumayan untuk Lebaran (beras dan telurnya)," katanya.

Sebagai ketua RT, ia pun tak tahu kapan masyarakat di desanya bakal menerima bantuan beras dan telur tersebut.

Beberapa kartu milik warga sudah digesek di mesin *electronic data capture* (EDC) yang menandakan saldo dalam tabungan warga telah disetor ke agen penyedia beras dan telur. **(Rani Ummi Fadila)*****